



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan dalam upaya penataan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan hasil validasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/123/M.SM.04.00/2022, telah diperoleh Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali kota adalah Wali kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang merupakan unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang

disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menetapkan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Dumai secara adil, objektif dan transparan berdasarkan Evaluasi Jabatan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Wali kota ini adalah untuk memberikan standar dalam penyusunan peringkat jabatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan.

BAB II EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan Evaluasi Jabatan dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi jabatan dengan *Factor Evaluation System*.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan berupa Nama Jabatan, Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Informasi Faktor Jabatan digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi PNS.

Pasal 4

- (1) Metode *Factor Evaluation System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digunakan untuk menentukan bobot jabatan yang terdiri dari kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria dalam Informasi Faktor Jabatan.
- (2) Bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jabatan manajerial; dan
 - b. jabatan non manajerial.
- (3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Manajerial meliputi:
 1. ruang lingkup dan dampak;
 2. pengaturan organisasi;
 3. wewenang;
 4. sifat hubungan;
 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 6. kondisi lain;
 - b. Jabatan Non Manajerial meliputi:
 1. pengetahuan dan keahlian;
 2. pengawasan;
 3. pedoman kerja;
 4. kompleksitas;

5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan interpersonal;
 7. tujuan hubungan;
 8. tuntutan fisik; dan
 9. lingkungan kerja.
- (4) Bobot Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Tabel Kelas Jabatan dan Nilai jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Penilaian untuk Kelas Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- (2) Penilaian untuk Kelas Jabatan Non Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, didasarkan pada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB III KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN

Pasal 6

- (1) Kelas Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat Pegawai berdasarkan sifat, jenis, beban pekerjaan dan besaran tunjangan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui Evaluasi Jabatan.
- (3) Penyusunan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas; dan
 - b. Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (3) Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PERUBAHAN NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Jabatan;

- b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada Jabatan; atau
c. hal lain yang menyebabkan perubahan Informasi Faktor Jabatan.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan.
- (5) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila tidak tercantum nama jabatan dalam kolom Nama Jabatan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini mengenai nilai jabatan dan kelas jabatan, maka dipersamakan dengan Jabatan yang penjabaran tugasnya memiliki kesesuaian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 53 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 9 Februari 2022

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 4 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DUMAI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DAN
NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAIDAFTAR KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PADA JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
I. SEKRETARIAT DAERAH.			
1.	Sekretaris Daerah	15	3.555
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3.030
3.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	13	2.715
4.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	13	2.715
5.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Informasi Teknologi, Ekonomi dan Keuangan	13	2.715
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12	2.315
7.	Kepala Subbagian Otonomi Daerah	9	1.430
8.	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan	9	1.430
9.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan	9	1.430
10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2.315
11.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial	9	1.430
12.	Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual	9	1.430
13.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat	9	1.430
14.	Kepala Bagian Hukum	12	2.315
15.	Kepala Subbagian Perundang-Undangan	9	1.430
16.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi	9	1.430
17.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum	12	1.430
18.	Kepala Bagian Kerja Sama	12	2.315
19.	Kepala Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	9	1.430
20.	Kepala Subbagian Evaluasi Kerja Sama	9	1.430
21.	Kepala Subbagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	8	1.295
22.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	3.030
23.	Kepala Bagian Perekonomian	12	2.315
24.	Kepala Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	9	1.430
25.	Kepala Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	9	1.430
26.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	9	1.430
27.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12	2.315
28.	Kepala Subbagian Penyusunan Program	9	1.430
29.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	8	1.165
30.	Kepala Subbagian Pengendalian Program	9	1.430
31.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	12	2.315
32.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	1.430
33.	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	9	1.430
34.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	9	1.430
35.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	12	2.315
36.	Kepala Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	9	1.430
37.	Kepala Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup	9	1.430
38.	Kepala Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air	9	1.430
39.	Asisten Administrasi Umum	14	3.030
40.	Kepala Bagian Umum	12	2.315
41.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	9	1.430
42.	Kepala Subbagian Protokol	9	1.430
43.	Kepala Subbagian Perlengkapan	9	1.430
44.	Kepala Bagian Organisasi	12	2.315
45.	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9	1.430
46.	Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	9	1.430
47.	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9	1.430
48.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	2.315
49.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
50.	Kepala Subbagian Keuangan	9	1.430
51.	Kepala Subbagian Pelaporan	9	1.430
52.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	2.315
53.	Kepala Subbagian Protokol	9	1.430
54.	Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan	9	1.430
55.	Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan	9	1.430

1	2	3	4
II. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.			
56.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14	2.865
57.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	11	2.090
58.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	1.430
59.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9	1.430
60.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	9	1.430
61.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan	11	2.090
62.	Kepala Subbagian Kajian Perundang-undangan	9	1.430

63.	Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah	9	1.430
64.	Kepala Subbagian Humas, Protokol dan Perpustakaan	9	1.430
65.	Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan	11	2.090
66.	Kepala Subbagian Fasilitas Penganggaran	9	1.430
67.	Kepala Subbagian Fasilitas Pengawasan	9	1.430
68.	Kepala Subbagian Kerjasama dan Aspirasi	8	1.295
III. INSPEKTORAT DAERAH.			
69.	Inspektur Daerah	14	3.030
70.	Sekretaris	12	2.140
71.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	9	1.430
72.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
73.	Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi	9	1.430
74.	Inspektur Pembantu I	11	1.990
75.	Inspektur Pembantu II	11	1.990
76.	Inspektur Pembantu III	11	1.990
77.	Inspektur Pembantu IV	11	1.990
78.	Inspektur Pembantu V	11	1.990
IV. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.			
79.	Kepala	14	2.865
80.	Sekretaris	12	2.115
81.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
82.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
83.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
84.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	11	2.045
85.	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak	9	1.430
86.	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal	9	1.430
87.	Kepala Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	9	1.430
88.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	11	2.045
89.	Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik dan Kelembagaan Sekolah Dasar	9	1.430
90.	Kepala Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Dasar	9	1.430
91.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	9	1.430
92.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11	2.045
93.	Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama	99	1.430
94.	Kepala Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9	1.430
95.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9	1.430
96.	Kepala Bidang Kebudayaan	11	2.045
97.	Kepala Seksi Seni dan Budaya	9	1.430
98.	Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan	9	1.430
99.	Kepala Seksi Pelestarian	9	1.430
V. DINAS KESEHATAN.			
100.	Kepala	14	2.865
101.	Sekretaris	12	2.115
102.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
103.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
104.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
105.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	2.045
106.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	9	1.430
107.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	9	1.430
108.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan	9	1.430
109.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	2.045
110.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	9	1.430
111.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	1.430
112.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	9	1.430
113.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	11	2.045
114.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	8	1.295
115.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	9	1.430
116.	Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	9	1.430
117.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	2.045
118.	Kepala Seksi Kesiediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	8	1.295
119.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan	8	1.165
120.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	8	1.295
121.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kelas A	9	1.430
1	2	3	4
122.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
123.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	9	1.430
124.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
VI. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.			
125.	Direktur	13	2.715
126.	Wakil Direktur Pelayanan	12	2.115
127.	Kepala Bidang Pelayanan	11	2.045
128.	Kepala Seksi Pelayanan Medis	9	1.430
129.	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan	9	1.430
130.	Kepala Bidang Keperawatan	11	2.045
131.	Kepala Seksi Etika dan Mutu	9	1.430
132.	Kepala Seksi Asuhan Keperawatan	9	1.430
133.	Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis	11	2.045
134.	Kepala Seksi Penunjang Medis	9	1.430
135.	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	9	1.430
136.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	12	2.115
137.	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	11	2.045
138.	Kepala Subbagian Umum	9	1.430
139.	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	1.430
140.	Kepala Bagian Keuangan dan Aset	11	2.045
141.	Kepala Subbagian Akuntansi, Verifikasi dan Aset	9	1.430
142.	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9	1.430
143.	Kepala Bagian Perencanaan dan Program	11	2.045
144.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
145.	Kepala Subbagian Program, Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	9	1.430
VII. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.			
	Kepala	14	2.865

146.				
147.		Sekretaris	12	2.115
148.		Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
149.		Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
150.		Kepala Subbagian Data dan Informasi Publik	9	1.430
151.		Kepala Bidang Sumber Daya Air	11	2.045
152.		Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air	9	1.430
153.		Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air	9	1.430
154.		Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan	9	1.430
155.		Kepala Bidang Bina Marga	11	2.045
156.		Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi	9	1.430
157.		Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	9	1.430
158.		Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan	9	1.430
159.		Kepala Bidang Cipta Karya	11	2.045
160.		Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian	9	1.430
161.		Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman	9	1.430
162.		Kepala Seksi Penataan Bangunan	9	1.430
163.		Kepala Bidang Tata Ruang	11	2.045
164.		Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan	9	1.430
165.		Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9	1.430
166.		Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang	9	1.430
167.		Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan	11	2.045
168.		Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	9	1.430
169.		Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi	9	1.430
170.		Kepala Seksi Peralatan dan Laboratorium	9	1.430
171.		Kepala Unit Pelaksana Teknis Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A	9	1.430
172.		Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
173.		Kepala Unit Pelaksana Teknis Peningkatan dan pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A	9	1.430
174.		Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
175.		Kepala Unit Pelaksana Teknis Peningkatan dan pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A	9	1.430
176.		Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
VIII. DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN.				
177.		Kepala	14	2.865
178.		Sekretaris	12	2.115
179.		Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik	9	1.430
180.		Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
181.		Kepala Bidang Perumahan Rakyat	11	2.045
182.		Kepala Seksi pendataan, Perencanaan & Perumahan	9	1.430
183.		Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Pemukiman	8	1.295
184.		Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi	9	1.430
185.		Kepala Bidang Kawasan Pemukiman	11	2.045
186.		Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Pemukiman	9	1.430
187.		Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman	9	1.430
188.		Kepala Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Pemanfaatan dan Pengendalian	9	1.430

1	2	3	4	
IX. DINAS SOSIAL.				
189.		Kepala	14	2.865
190.		Sekretaris	12	2.115
191.		Kepala Subbagian Program dan Data	9	1.430
192.		Kepala Subbagian Ketatausahaan, Keuangan dan Aset	9	1.430
193.		Kepala Bidang Penanganan dan Rehabilitas Sosial	11	2.045
194.		Kepala Seksi Rehabilitas Sosial	9	1.430
195.		Kepala Seksi Penanganan Bencana Alam dan Sosial	9	1.430
196.		Kepala Seksi Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9	1.430
197.		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	2.045
198.		Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	9	1.430
199.		Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	9	1.430
200.		Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	9	1.430
X. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.				
201.		Kepala	14	2.865
202.		Sekretaris	12	2.115
203.		Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
204.		Kepala Subbagian Keuangan	9	1.430
205.		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.295
206.		Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	2.045
207.		Kepala Seksi Identitas Penduduk	8	1.295
208.		Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	8	1.165
209.		Kepala Seksi Pendataan Penduduk	8	1.165
210.		Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	2.045
211.		Kepala Seksi Kelahiran	8	1.295
212.		Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	8	1.295
213.		Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	8	1.295
214.		Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	2.045
215.		Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	8	1.295
216.		Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data	8	1.295
217.		Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	8	1.295
218.		Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	2.045
219.		Kepala Seksi Kerja Sama	8	1.165
220.		Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	8	1.165
221.		Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	8	1.165
XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP.				
222.		Kepala	14	2.865
223.		Sekretaris	12	2.115
224.		Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
225.		Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
226.		Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
227.		Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan	11	2.045
228.		Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	9	1.430
		Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	9	1.430

229.			
230.	Kepala Seksi Pertamanan	9	1.430
231.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	11	2.045
232.	Kepala Seksi Pengurangan Sampah	8	1.295
233.	Kepala Seksi Penanganan Sampah	9	1.430
234.	Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	9	1.430
235.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	11	2.045
236.	Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan	8	1.165
237.	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	9	1.430
238.	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan	9	1.430
239.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	11	2.045
240.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	9	1.430
241.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	9	1.430
242.	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas	9	1.430
243.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A	9	1.430
244.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
XII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.			
245.	Kepala	14	2.865
246.	Sekretaris	12	2.115
247.	Kepala Subbagian Perencanaan	8	1.295
248.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
249.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	8	1.295
250.	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga	11	2.045
251.	Kepala Seksi Pengembangan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Bidang Ekonomi	8	1.165
252.	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Bidang Sosial Politik dan Hukum	8	1.165
253.	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Bidang Ketahanan Keluarga	8	1.295
254.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	11	2.045
1	2	3	4
255.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak	9	1.430
256.	Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak	8	1.295
257.	Kepala Seksi Partisipasi Anak	8	1.165
258.	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan	11	2.045
259.	Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	9	1.430
260.	Kepala Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	8	1.295
261.	Kepala Seksi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	8	1.165
262.	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	11	2.045
263.	Kepala Seksi Data dan Informasi Gender	8	1.295
264.	Kepala Seksi Data Informasi Anak	8	1.165
265.	Kepala Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak	8	1.165
266.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A	9	1.430
267.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
XIII. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.			
268.	Kepala	14	2.865
269.	Sekretaris	12	2.115
270.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	9	1.430
271.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
272.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	11	2.045
273.	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	8	1.295
274.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana	8	1.295
275.	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	8	1.165
276.	Kepala Bidang Keluarga Berencana	11	2.045
277.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian	8	1.295
278.	Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	8	1.295
279.	Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana	9	1.430
280.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	2.045
281.	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	8	1.295
282.	Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Bawah Lima Tahun, Anak dan Lanjut Usia	9	1.430
283.	Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja	8	1.295
XIV. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.			
284.	Kepala	14	2.865
285.	Sekretaris	12	2.115
286.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
287.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
288.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
289.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	11	2.045
290.	Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal	9	1.430
291.	Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah	8	1.165
292.	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah Penanaman Modal	8	1.165
293.	Kepala Bidang Promosi, Kerja Sama Data dan Informasi Investasi	11	2.045
294.	Kepala Seksi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri	8	1.165
295.	Kepala Seksi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri	8	1.295
296.	Kepala Seksi Data dan Informasi	8	1.165
297.	Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Investasi dan Perizinan	11	2.045
298.	Kepala Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8	1.295
299.	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8	1.165
300.	Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	8	1.165
301.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	11	2.045
302.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	9	1.430
303.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	9	1.430
304.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	9	1.430
305.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	11	2.045
306.	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	9	1.430
307.	Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	8	1.165
308.	Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	8	1.165
XV. DINAS PERDAGANGAN.			
309.	Kepala	14	2.865
310.	Sekretaris	12	2.115
311.	Kepala Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	1.430
312.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
313.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	11	2.045

314.	Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	9	1.430
315.	Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	9	1.430
316.	Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi	9	1.430
317.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	11	2.045
318.	Kepala Seksi Pengembangan Ekspor	9	1.430
319.	Kepala Seksi Fasilitasi Ekspor Impor	9	1.430
320.	Kepala Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor	9	1.430
321.	Kepala Bidang Kemetrolgian	11	2.045

1	2	3	4
322.	Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	9	1.430
323.	Kepala Seksi Bina Sumber Daya Manusia	9	1.430
324.	Kepala Seksi Pengawasan	9	1.430
325.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kelas A	9	1.430
326.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
327.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Retribusi Pasar Kelas A	9	1.430
328.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295

XVI. DINAS PERHUBUNGAN.

329.	Kepala	14	2.865
330.	Sekretaris	12	2.115
331.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	9	1.430
332.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	9	1.430
333.	Kepala Subbagian Keuangan	9	1.430
334.	Kepala Bidang Lalu Lintas	11	2.045
335.	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas	9	1.430
336.	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas	9	1.430
337.	Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas	8	1.295
338.	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	11	2.045
339.	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek	8	1.295
340.	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang	9	1.430
341.	Kepala Seksi Pengujian Sarana	8	1.295
342.	Kepala Bidang Prasarana	11	2.045
343.	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana	9	1.430
344.	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana	9	1.430
345.	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	9	1.430
346.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	11	2.045
347.	Kepala Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan	8	1.295
348.	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	8	1.295
349.	Kepala Seksi Keselamatan	8	1.295
350.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A	9	1.430
351.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
352.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kelas A	9	1.430
353.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295

XVII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

354.	Kepala	14	2.865
355.	Sekretaris	12	2.115
356.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
357.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
358.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
359.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	11	2.045
360.	Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Pangan	9	1.430
361.	Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Hortikultura	9	1.430
362.	Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman	8	1.295
363.	Kepala Bidang Perkebunan	11	2.045
364.	Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan	9	1.430
365.	Kepala Seksi Teknologi dan Pengolahan Hasil Perkebunan	9	1.430
366.	Kepala Seksi Perlindungan Perkebunan	9	1.430
367.	Kepala Bidang Peternakan	11	2.045
368.	Kepala Seksi Produksi Ternak	9	1.430
369.	Kepala Seksi Pembibitan Ternak	8	1.295
370.	Kepala Seksi Pakan, Pengelolaan Produk dan Hasil Ternak	8	1.165
371.	Kepala Bidang Penyuluhan	11	2.045
372.	Kepala Seksi Program Penyuluhan	9	1.430
373.	Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan	8	1.165
374.	Kepala Seksi Pengkajian Metode dan Teknologi Penyuluhan	8	1.165
375.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	11	2.045
376.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan	8	1.165
377.	Kepala Seksi Distribusi dan Kewaspadaan Pangan	8	1.165
378.	Kepala Seksi Konsumsi, Mutu dan Ketahanan Pangan	8	1.165
379.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	11	2.045
380.	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	8	1.165
381.	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	8	1.165
382.	Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Pembinaan Kelembagaan Veteriner	8	1.295
383.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Kelas A	9	1.430
384.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
385.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan dan Laboratorium Veteriner Kelas A	9	1.430
386.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
387.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Kelas A	9	1.430
388.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295

1	2	3	4
XVIII. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.			
389.	Kepala	14	2.865
390.	Sekretaris	12	2.115
391.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	9	1.430
392.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
393.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas	11	2.045

394.	Kepala Seksi Pelatihan dan Standar Kompetensi Tenaga Kerja	9	1.430
395.	Kepala Seksi Instruktur Lembaga dan Sarana	9	1.430
396.	Kepala Seksi Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja	9	1.430
397.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	11	2.045
398.	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan	9	1.430
399.	Kepala Seksi Kelembagaan	9	1.430
400.	Kepala Seksi Syarat Kerja	8	1.295
401.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	2.045
402.	Kepala Seksi Transmigrasi dan Perluasan Kerja	9	1.430
403.	Kepala Seksi Bursa Kerja	9	1.430
404.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	9	1.430
XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.			
405.	Kepala	14	2.865
406.	Sekretaris	12	2.115
407.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	9	1.430
408.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
409.	Kepala Bidang Perpustakaan	11	2.045
410.	Kepala Seksi Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	9	1.430
411.	Kepala Seksi Standarisasi dan Otomasi Kepustakaan	9	1.430
412.	Kepala Seksi Pelayanan Jasa Kepustakaan	9	1.430
413.	Kepala Bidang Kearsipan	11	2.045
414.	Kepala Seksi Pengumpulan dan Akuisisi Arsip	9	1.430
415.	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	8	1.295
416.	Kepala Seksi Pelayanan Kearsipan	8	1.295
XX. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.			
417.	Kepala	14	2.865
418.	Sekretaris	12	2.115
419.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	9	1.430
420.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
421.	Kepala Bidang Kepemudaan	11	2.045
422.	Kepala Seksi Organisasi Pemuda	9	1.430
423.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda	9	1.430
424.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda	8	1.295
425.	Kepala Bidang Olahraga	11	2.045
426.	Kepala Seksi Pengembangan Olahraga	8	1.165
427.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana OR	8	1.295
428.	Kepala Seksi Olahraga Prestasi	8	1.295
429.	Kepala Bidang Pariwisata	11	2.045
430.	Kepala Seksi Pengawasan Objek Wisata	8	1.295
431.	Kepala Seksi Sarana Pariwisata	9	1.430
432.	Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Wisata	8	1.295
433.	kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A	9	1.430
434.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
XXI. DINAS PERIKANAN.			
435.	Kepala	14	2.865
436.	Sekretaris	12	2.115
437.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	9	1.430
438.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
439.	Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan	11	2.045
440.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan	8	1.295
441.	Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan	9	1.430
442.	Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	9	1.430
443.	Kepala Bidang Kenelayanan	11	2.045
444.	Kepala Seksi Kenelayanan	9	1.430
445.	Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perikanan	9	1.430
446.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	9	1.430
447.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Veteriner Kelas A	9	1.430
448.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
449.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A	9	1.430
450.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
XXII. DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL.			
451.	Kepala	14	2.865
452.	Sekretaris	12	2.115
453.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	9	1.430
1	2	3	4
454.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
455.	Kepala Bidang Perindustrian	11	2.045
456.	Kepala Seksi Sarana Umum dan Usaha Industri	9	1.430
457.	Kepala Seksi Pembinaan Industri	9	1.430
458.	Kepala Seksi Pengawasan Industri	9	1.430
459.	Kepala Bidang Koperasi	11	2.045
460.	Kepala Seksi Kelembagaan	8	1.295
461.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Koperasi	9	1.430
462.	Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam	9	1.430
463.	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11	2.045
464.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8	1.165
465.	Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9	1.430
466.	Kepala Seksi Bina Sarana dan Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8	1.295
467.	kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kelas A	9	1.430
468.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
XXIII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.			
469.	Kepala	14	2.865
470.	Sekretaris	12	2.115
471.	Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset	9	1.430
472.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
473.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	11	2.045
474.	Kepala Seksi Pengawasan	8	1.295
475.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	8	1.165
476.	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	8	1.295
	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11	2.045

477.			
478.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	9	1.430
479.	Kepala Seksi Kerja sama	8	1.295
480.	Kepala Seksi Pemantauan dan Tindak Internal	9	1.430
481.	Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur	11	2.045
482.	Kepala Seksi Satlinmas	8	1.295
483.	Kepala Seksi Data Informasi dan Pelatihan	8	1.295
484.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	8	1.295
XXIV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.			
485.	Kepala	14	3.030
486.	Sekretaris	12	2.140
487.	Kepala Subbagian Program	9	1.430
488.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
489.	Kepala Subbagian Keuangan	9	1.430
490.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	11	2.045
491.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan	9	1.430
492.	Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	9	1.430
493.	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan	9	1.430
494.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11	2.045
495.	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	1.430
496.	Kepala Subbidang Kesehatan dan Kependudukan	9	1.430
497.	Kepala Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1.430
498.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	11	2.045
499.	Kepala Subbidang Pertanian	9	1.430
500.	Kepala Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9	1.430
501.	Kepala Subbidang Perindustrian dan Perdagangan	9	1.430
502.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	11	2.045
503.	Kepala Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang	9	1.430
504.	Kepala Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup	9	1.430
505.	Kepala Subbidang Perumahan dan Pemukiman	8	1.295
XXV. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.			
506.	Kepala	14	3.030
507.	Sekretaris	12	2.140
508.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
509.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
510.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
511.	Kepala Bidang Anggaran	11	2.045
512.	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran	9	1.430
513.	Kepala Subbidang Perubahan dan Pergeseran Anggaran	9	1.430
514.	Kepala Subbidang Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran	9	1.430
515.	Kepala Bidang Aset	11	2.045
516.	Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset	9	1.430
517.	Kepala Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset	9	1.430
518.	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset	9	1.430
519.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	11	2.045
520.	Kepala Subbidang Pelaporan	9	1.430
XXVI. BADAN PENDAPATAN DAERAH.			
521.	Kepala Subbidang Akuntansi	9	1.430
522.	Kepala Subbidang Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi	9	1.430
523.	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	2.045
524.	Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	9	1.430
525.	Kepala Subbidang Belanja Daerah	9	1.430
526.	Kepala Subbidang Penatausahaan Gaji	9	1.430
XXVII. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.			
527.	Kepala	14	3.030
528.	Sekretaris	12	2.140
529.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
530.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
531.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
532.	Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11	2.045
533.	Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan	9	1.430
534.	Kepala Subbidang Penetapan	9	1.430
535.	Kepala Subbidang Pelayanan, Pegolahan Data dan Informasi	9	1.430
536.	Kepala Bidang Penagihan	11	2.045
537.	Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan	8	1.295
538.	Kepala Subbidang Penagihan	8	1.295
539.	Kepala Subbidang Verifikasi dan Evaluasi	8	1.295
540.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11	2.045
541.	Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8	1.295
542.	Kepala Subbidang Penetapan dan Pelayanan	8	1.295
543.	Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8	1.295
544.	Kepala Bidang Hukum Dan Keberatan	11	2.045
545.	Kepala Subbidang Hukum dan Potensi	8	1.295
546.	Kepala Subbidang Pengajuan dan Keberatan	8	1.295
547.	Kepala Subbidang Pemeriksaan	8	1.295
XXVIII. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.			
548.	Kepala	14	2.865
549.	Sekretaris	12	2.115
550.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.295
551.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
552.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	11	2.045
553.	Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian	9	1.430
554.	Kepala Subbidang Data dan Informasi	9	1.430
555.	Kepala Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara	9	1.430
556.	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan	11	2.045
557.	Kepala Subbidang Jabatan Tinggi dan Administrasi	9	1.430
558.	Kepala Subbidang Kepangkatan	8	1.295
559.	Kepala Subbidang Jabatan Fungsional	8	1.165
	Kepala Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	11	2.045

1	2	3	4
521.	Kepala Subbidang Akuntansi	9	1.430
522.	Kepala Subbidang Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi	9	1.430
523.	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	2.045
524.	Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	9	1.430
525.	Kepala Subbidang Belanja Daerah	9	1.430
526.	Kepala Subbidang Penatausahaan Gaji	9	1.430
XXVI. BADAN PENDAPATAN DAERAH.			
527.	Kepala	14	3.030
528.	Sekretaris	12	2.140
529.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
530.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
531.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
532.	Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11	2.045
533.	Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan	9	1.430
534.	Kepala Subbidang Penetapan	9	1.430
535.	Kepala Subbidang Pelayanan, Pegolahan Data dan Informasi	9	1.430
536.	Kepala Bidang Penagihan	11	2.045
537.	Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan	8	1.295
538.	Kepala Subbidang Penagihan	8	1.295
539.	Kepala Subbidang Verifikasi dan Evaluasi	8	1.295
540.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11	2.045
541.	Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8	1.295
542.	Kepala Subbidang Penetapan dan Pelayanan	8	1.295
543.	Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8	1.295
544.	Kepala Bidang Hukum Dan Keberatan	11	2.045
545.	Kepala Subbidang Hukum dan Potensi	8	1.295
546.	Kepala Subbidang Pengajuan dan Keberatan	8	1.295
547.	Kepala Subbidang Pemeriksaan	8	1.295
XXVII. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.			
548.	Kepala	14	2.865
549.	Sekretaris	12	2.115
550.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.295
551.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
552.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	11	2.045
553.	Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian	9	1.430
554.	Kepala Subbidang Data dan Informasi	9	1.430
555.	Kepala Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara	9	1.430
556.	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan	11	2.045
557.	Kepala Subbidang Jabatan Tinggi dan Administrasi	9	1.430
558.	Kepala Subbidang Kepangkatan	8	1.295
559.	Kepala Subbidang Jabatan Fungsional	8	1.165
	Kepala Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	11	2.045

560.			
561.	Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi	9	1.430
562.	Kepala Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8	1.295
563.	Kepala Subbidang Disiplin dan Penghargaan	9	1.430
XXVIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.			
564.	Kepala Pelaksana	13	2.465
565.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1.430
566.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	8	1.295
567.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	9	1.430
568.	Kepala Seksi Rehabilitas dan Kontruksi	8	1.295
569.	kepala Unit Pelaksana Teknis pemadam Kebakaran kelas A	9	1.430
570.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
XXIX. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.			
571.	Kepala	14	2.865
572.	Sekretaris	12	2.115
573.	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	9	1.430
574.	Kepala Subbagian Keuangan	9	1.430
575.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.165
576.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	11	2.045
577.	Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	9	1.430
578.	Kepala Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	8	1.295
579.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	11	2.045
580.	Kepala Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	9	1.430
581.	Kepala Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik	8	1.295
582.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	11	2.045
583.	Kepala Subbidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	9	1.430
584.	Kepala Subbidang Organisasi Masyarakat	9	1.430
585.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	11	2.045
586.	Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	9	1.430
1	2	3	4
587.	Kepala Subbidang Penanganan Konflik	8	1.295
XXX. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.			
588.	Kepala	14	2.865
589.	Sekretaris	12	2.115
590.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
591.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
592.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
593.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	2.045
594.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunika Publik	8	1.165
595.	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	8	1.165
596.	Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	8	1.165
597.	Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government	11	2.045
598.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	8	1.165
599.	Kepala Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Interoperabilitas	8	1.165
600.	Kepala Seksi Interkoneksi Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	9	1.430
601.	Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government	11	2.045
602.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi E-Government	8	1.295
603.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	8	1.295
604.	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government	8	1.165
605.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	11	2.045
606.	Kepala Seksi Pendataan, Pengelolaan dan Analisa Data Statistik Sektoral	8	1.165
607.	Kepala Seksi Perjanjian Data dan Informasi Statistik Sektoral	8	1.165
608.	Kepala Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi	9	1.430
XXXI. KECAMATAN DUMAI BARAT.			
609.	Camat	12	2.315
610.	Sekretaris	11	2.090
611.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
612.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
613.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.320
614.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
615.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1.320
616.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9	1.455
617.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.320
A. KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN.			
618.	Lurah	9	1.540
619.	Sekretaris	8	1.320
620.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
621.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
622.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
B. KELURAHAN PURNAMA.			
623.	Lurah	9	1.540
624.	Sekretaris	8	1.320
625.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
626.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
627.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
C. KELURAHAN PANGKALAN SESAI.			
628.	Lurah	9	1.540
629.	Sekretaris	8	1.320
630.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
631.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
632.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
D. KELURAHAN BAGAN KELADI.			

633.	Lurah	9	1.540
634.	Sekretaris	8	1.320
635.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
636.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
637.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
XXXII. KECAMATAN DUMAI TIMUR.			
638.	Camat	12	2.315
639.	Sekretaris	11	2.090
640.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
641.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
642.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.320
643.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	1.190
644.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	9	1.455
645.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8	1.190
646.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.320
A. KELURAHAN BUKIT BATREM.			
647.	Lurah	9	1.540

1	2	3	4
648.	Sekretaris	8	1.320
649.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
650.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
651.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
B. KELURAHAN BULUH KASAP.			
652.	Lurah	9	1.540
653.	Sekretaris	8	1.320
654.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
655.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
656.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
C. KELURAHAN JAYA MUKTI.			
657.	Lurah	9	1.540
658.	Sekretaris	8	1.320
659.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
660.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
661.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
D. KELURAHAN TANJUNG PALAS.			
662.	Lurah	9	1.540
663.	Sekretaris	8	1.320
664.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
665.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
666.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
E. KELURAHAN TELUK BINJAI.			
667.	Lurah	9	1.540
668.	Sekretaris	8	1.320
669.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
670.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
671.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
XXXIII. KECAMATAN BUKIT KAPUR.			
672.	Camat	12	2.315
673.	Sekretaris	11	2.090
674.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
675.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
676.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.320
677.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
678.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1.190
679.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8	1.190
680.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.320
A. KELURAHAN BUKIT KAPUR.			
681.	Lurah	9	1.540
682.	Sekretaris	8	1.320
683.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
684.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
685.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
B. KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR.			
686.	Lurah	9	1.540
687.	Sekretaris	8	1.320
688.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
689.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
690.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
C. KELURAHAN BUKIT NENAS.			

691.	Lurah	9	1.540
692.	Sekretaris	8	1.320
693.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
694.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
695.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
D. KELURAHAN BAGAN BESAR.			
696.	Lurah	9	1.540
697.	Sekretaris	8	1.320
698.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
699.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
700.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
E. KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR.			
701.	Lurah	9	1.540
702.	Sekretaris	8	1.320
703.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
704.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
705.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165

1	2	3	4
F. KELURAHAN GURUN PANJANG.			
706.	Lurah	9	1.540
707.	Sekretaris	8	1.320
708.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
709.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
710.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
G. KELURAHAN KAMPUNG BARU.			
711.	Lurah	9	1.540
712.	Sekretaris	8	1.320
713.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
714.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
715.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
XXXIV. KECAMATAN MEDANG KAMPAI.			
716.	Camat	12	2.315
717.	Sekretaris	11	2.090
718.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
719.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
720.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.320
721.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
722.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1.320
723.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8	1.320
724.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.190
A. Kelurahan Mundam.			
725.	Lurah	9	1.540
726.	Sekretaris	8	1.320
727.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
728.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
729.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
B. KELURAHAN TELUK MAKMUR.			
730.	Lurah	9	1.540
731.	Sekretaris	8	1.320
732.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
733.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
734.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
C. KELURAHAN GUNTING.			
735.	Lurah	9	1.540
736.	Sekretaris	8	1.320
737.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
738.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
739.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
D. KELURAHAN PELINTUNG.			
740.	Lurah	9	1.540
741.	Sekretaris	8	1.320
742.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
743.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
744.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
XXXV. KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.			
745.	Camat	12	2.315
746.	Sekretaris	11	2.090
747.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
748.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320

749.	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1.455
750.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	1.320
751.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1.320
752.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8	1.320
753.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.320
A. KELURAHAN SUNGAI GENIOT.			
754.	Lurah	9	1.540
755.	Sekretaris	8	1.320
756.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
757.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
758.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
B. KELURAHAN LUBUK GAUNG.			
759.	Lurah	9	1.540
760.	Sekretaris	8	1.320
761.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
762.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
763.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295

1	2	3	4
C. KELURAHAN BANGSAL ACEH.			
764.	Lurah	9	1.540
765.	Sekretaris	8	1.320
766.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
767.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
768.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
D. KELURAHAN BASILAM BARU.			
769.	Lurah	9	1.540
770.	Sekretaris	8	1.320
771.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
772.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
773.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
E. KELURAHAN BATU TERITIP.			
774.	Lurah	9	1.540
775.	Sekretaris	8	1.320
776.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
777.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
778.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
F. KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL.			
779.	Lurah	9	1.540
780.	Sekretaris Lurah	8	1.320
781.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
782.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
783.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
XXXVI. KECAMATAN DUMAI KOTA.			
784.	Camat	12	2.315
785.	Sekretaris	11	2.090
786.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
787.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
788.	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1.455
789.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
790.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1.320
791.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8	1.320
792.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.320
A. KELURAHAN DUMAI KOTA.			
793.	Lurah	9	1.540
794.	Sekretaris	8	1.320
795.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
796.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
797.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
B. KELURAHAN LAKSAMANA.			
798.	Lurah	9	1.540
799.	Sekretaris	8	1.320
800.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
801.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
802.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
C. KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG.			
803.	Lurah	9	1.540
804.	Sekretaris	8	1.320
805.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
806.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
807.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
D. KELURAHAN SUKAJADI.			
808.	Lurah	9	1.540
809.	Sekretaris	8	1.320
810.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
811.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165

812.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
E. KELURAHAN BINTAN.			
813.	Lurah	9	1.540
814.	Sekretaris	8	1.320
815.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
816.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
817.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
XXXVII. KECAMATAN DUMAI SELATAN.			
818.	Camat	12	2.315
819.	Sekretaris	11	2.090
820.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
1	2	3	4
821.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
822.	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1.455
823.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
824.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1.320
825.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9	1.455
826.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	1.455
A. KELURAHAN BUKIT DATUK.			
827.	Lurah	9	1.540
828.	Sekretaris	8	1.320
829.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
830.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
831.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
B. KELURAHAN BUMI AYU.			
832.	Lurah	9	1.540
833.	Sekretaris	8	1.320
834.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
835.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
836.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
C. KELURAHAN BUKIT TIMAH.			
837.	Lurah	9	1.540
838.	Sekretaris	8	1.320
839.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
840.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
841.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
D. KELURAHAN RATU SIMA.			
842.	Lurah	9	1.540
843.	Sekretaris	8	1.320
844.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
845.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
846.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
E. KELURAHAN MEKAR SARI.			
847.	Lurah	9	1.540
848.	Sekretaris	8	1.320
849.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
850.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
851.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DAN
NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DAFTAR KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN
PADA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
1.	Ajudan	6	790
2.	Akupunturis	6	690
3.	Analisis Advokasi Hukum	7	890
4.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	890
5.	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	7	890
6.	Analisis Aset Daerah	7	890
7.	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	7	890
8.	Analisis Bahan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja	7	890
9.	Analisis Bahan Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan	7	890
10.	Analisis Bahan Penyelenggaraan Program Pemagangan	7	890
11.	Analisis Bahan Penyuluhan, Bimbingan Jabatan, dan Perantaraan Kerja	7	890
12.	Analisis Bahan Persyaratan Kerja	7	890
13.	Analisis Bahasa dan Sasta	7	890
14.	Analisis Bangunan dan Perumahan	7	890
15.	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	7	890
16.	Analisis Bencana	7	890
17.	Analisis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi	7	890
18.	Analisis Bina Kehidupan Agama	7	890
19.	Analisis Budaya	7	890
20.	Analisis Budidaya Perikanan	7	890
21.	Analisis Data dan Informasi	7	890
22.	Analisis Data Pengujian Sarana	7	890
23.	Analisis Data Sertifikasi Industri Metalurgi	7	890
24.	Analisis Desa dan Kelurahan	7	890
25.	Analisis Pendidikan dan Pelatihan	7	890
26.	Analisis Ekonomi Industri	7	890
27.	Analisis Ekonomi Kreatif	7	890
28.	Analisis Ekstensifikasi	7	890
29.	Analisis Fasilitas Peningkatan Kompetensi	7	890
30.	Analisis Gizi	7	890
31.	Analisis Hukum	7	890
32.	Analisis Humas	7	890
33.	Analisis Informasi Hasil Pertanian	7	890
34.	Analisis Informasi Kebudayaan	7	890
35.	Analisis Informasi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
36.	Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
37.	Analisis Infrastruktur	7	890
38.	Analisis Jabatan	7	890
39.	Analisis Jalan Jembatan	7	890
40.	Analisis Jaminan Sosial	7	890
41.	Analisis Keberatan dan Banding	7	890
42.	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
43.	Analisis Kelembagaan	7	890
44.	Analisis Keluarga Berencana	7	890
45.	Analisis Kemasyarakatan	7	890
46.	Analisis Kemitraan	7	890
47.	Analisis Kepemudaan	7	890
48.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	890
49.	Analisis Kerja Sama	7	890
50.	Analisis Kerjasama Lembaga Keagamaan	7	890
51.	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7	890
52.	Analisis Kesehatan	7	890
53.	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	7	890
54.	Analisis Keselamatan Transportasi Jalan	7	890
55.	Analisis Ketenagalistrikan	7	890
56.	Analisis Keuangan	7	890
1	2	3	4
57.	Analisis Keuangan Badan Layanan Umum	7	890
58.	Analisis Kinerja	7	890
59.	Analisis Klasifikasi Barang	7	890
60.	Analisis Kompetensi	7	890
61.	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	890
62.	Analisis Lalu Lintas	7	890
63.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	890
64.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7	890
65.	Analisis Laporan Keuangan	7	890
66.	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	890

67.	Analisis Layanan Umum	7	890
68.	Analisis Legislasi	7	890
69.	Analisis Lingkungan Hidup	7	890
70.	Analisis Manajemen Risiko	7	890
71.	Analisis Metalografi	7	890
72.	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	7	890
73.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
74.	Analisis Mutu Hasil Perikanan	7	890
75.	Analisis Mutu Produk	7	890
76.	Analisis Obat dan Makanan	7	890
77.	Analisis Pajak Daerah	7	890
78.	Analisis Pelaksanaan Anggaran	7	890
79.	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	7	890
80.	Analisis Pelaksanaan Proyek Pemerintah	7	890
81.	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	7	890
82.	Analisis Pelayanan	7	890
83.	Analisis Pelayanan Publik	7	890
84.	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	890
85.	Analisis Pembangunan	7	890
86.	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	7	890
87.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	890
88.	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	890
89.	Analisis Pemeriksaan Pajak	7	890
90.	Analisis Pemerintahan Daerah	7	890
91.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7	890
92.	Analisis Penagihan	7	890
93.	Analisis Penagihan Pajak	7	890
94.	Analisis Penanaman Modal	7	890
95.	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	7	890
96.	Analisis Pendapatan Daerah	7	890
97.	Analisis Pengamanan Lingkungan	7	890
98.	Analisis Pengawas Pendidikan	7	890
99.	Analisis Pengawasan	7	890
100.	Analisis Pengelolaan Keuangan	7	890
101.	Analisis Pengelolaan Sarana Program	7	890
102.	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	890
103.	Analisis Pengembangan Infrastruktur	7	890
104.	Analisis Pengembangan Jabatan	7	890
105.	Analisis Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah	7	890
106.	Analisis Pengembangan Karir	7	890
107.	Analisis Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
108.	Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	7	890
109.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7	890
110.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
111.	Analisis Pengembangan Sistem Pembelajaran	7	890
112.	Analisis Pengembangan Teknologi Medis	7	890
113.	Analisis Pengembangan Wilayah	7	890
114.	Analisis Penilaian	7	890
115.	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agribisnis	7	890
116.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	890
117.	Analisis Perbendaharaan	7	890
118.	Analisis Perdagangan	7	890
119.	Analisis Perencanaan	7	890
120.	Analisis Perencanaan Anggaran	7	890
121.	Analisis Perencanaan Bisnis	7	890
122.	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7	890
123.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	7	890
124.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
125.	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	7	890
126.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
127.	Analisis Perizinan Transportasi	7	890

1	2	3	4
128.	Analisis Perlindungan Masyarakat	7	890
129.	Analisis Perlindungan Perempuan	7	890
130.	Analisis Permasalahan Hukum	7	890
131.	Analisis Politik Dalam Negeri	7	890
132.	Analisis Prasarana Pendidikan	7	890
133.	Analisis Produk Hukum	7	890
134.	Analisis Program Pendidikan dan Pelatihan	7	890
135.	Analisis Program Pembangunan	7	890
136.	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	7	890
137.	Analisis Promosi dan Kerjasama Luar Negeri	7	890
138.	Analisis Protokol	7	890
139.	Analisis Publikasi	7	890
140.	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	7	890
141.	Analisis Remunerasi	7	890
142.	Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat	7	890
143.	Analisis Rencana Program dan Anggaran	7	890
144.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
145.	Analisis Rencana Program dan Kerjasama	7	890
146.	Analisis Road Traffic and Transport Management Centre	7	890
147.	Analisis Sistem Informasi	7	890
148.	Analisis Sistem informasi dan jaringan	7	890
149.	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	7	890
150.	Analisis Standar Mutu Bahan dan Peralatan	7	890
151.	Analisis Sumber Daya Air	7	890
152.	Analisis Taman	7	890
153.	Analisis Tata Laksana	7	890
154.	Analisis Tata Praja	7	890

155.	Analisis Tata Usaha	7	890
156.	Analisis Teknis Survei Penanganan Dampak Transportasi Darat	7	890
157.	Analisis Tenaga Kerja	7	890
158.	Analisis Transaksi Keuangan	7	890
159.	Analisis Transportasi	7	890
160.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
161.	Bendahara	7	890
162.	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	890
163.	Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Muda	9	1.355
164.	Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Pertama	8	1.280
165.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	1.280
166.	Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Muda	9	1.355
167.	Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	8	1.280
168.	Jabatan Fungsional Apoteker Madya	11	1.945
169.	Jabatan Fungsional Apoteker Muda	9	1.370
170.	Jabatan Fungsional Apoteker Pertama	8	1.295
171.	Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Pelaksana	6	755
172.	Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.020
173.	Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Penyelia	8	1.245
174.	Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi Mahir	7	1.015
175.	Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi Penyelia	8	1.230
176.	Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi Terampil	6	835
177.	Jabatan Fungsional Auditor Muda	10	1.655
178.	Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana	6	690
179.	Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana Lanjutan	7	940
180.	Jabatan Fungsional Auditor Pertama	8	1.280
181.	Jabatan Fungsional Bidan Madya	11	1.930
182.	Jabatan Fungsional Bidan Muda	9	1.355
183.	Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana	6	740
184.	Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
185.	Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Pemula	5	490
186.	Jabatan Fungsional Bidan Penyelia	8	1.230
187.	Jabatan Fungsional Bidan Pertama	8	1.280
188.	Jabatan Fungsional Dokter Gigi Madya	12	2.225
189.	Jabatan Fungsional Dokter Gigi Muda	10	1.670
190.	Jabatan Fungsional Dokter Gigi Pertama	9	1.370
191.	Jabatan Fungsional Dokter Madya	12	2.225
192.	Jabatan Fungsional Dokter Muda	10	1.720
193.	Jabatan Fungsional Dokter Pertama	9	1.570
194.	Jabatan Fungsional Dokter Utama	14	2.805
195.	Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1.280
196.	Jabatan Fungsional Fisikawan Medis Muda	9	1.555
197.	Jabatan Fungsional Fisioterapis Pelaksana	6	740
198.	Jabatan Fungsional Guru Madya	11	1.960
1	2	3	4
199.	Jabatan Fungsional Guru Muda	9	1.385
200.	Jabatan Fungsional Guru Pertama	8	1.280
201.	Jabatan Fungsional Instruktur Pelaksana	6	740
202.	Jabatan Fungsional Instruktur Pertama	8	1.280
203.	Jabatan Fungsional Ipidemiolog Kesehatan Muda	9	1.555
204.	Jabatan Fungsional Ipidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	740
205.	Jabatan Fungsional Nutrisionis Muda	9	1.555
206.	Jabatan Fungsional Nutrisionis Pelaksana	6	740
207.	Jabatan Fungsional Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
208.	Jabatan Fungsional Nutrisionis Penyelia	8	1.230
209.	Jabatan Fungsional Nutrisionis Pertama	8	1.280
210.	Jabatan Fungsional Nutrsionis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
211.	Jabatan Fungsional Penata Anestesi Muda	9	1.415
212.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Pertama	8	1.280
213.	Jabatan Fungsional Penera Mahir	7	1.005
214.	Jabatan Fungsional Pengamat Tera Penyelia	8	1.230
215.	Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Pertama	8	1.280
216.	Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
217.	Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian Pertama	8	1.280
218.	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	11	1.930
219.	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	9	1.355
220.	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	1.280
221.	Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Madya	11	1.960
222.	Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Muda	9	1.385
223.	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama	8	1.270
224.	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda	10	1.695
225.	Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	1.035
226.	Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Pertama	8	1.280
227.	Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.385
228.	Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.310
229.	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Madya	11	2.030
230.	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Muda	9	1.385
231.	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1.035
232.	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1.260
233.	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Pertama	8	1.310
234.	Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana	6	770
235.	Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.035
236.	Jabatan Fungsional Perawat Gigi Penyelia	8	1.260
237.	Jabatan Fungsional Perawat Madya	11	1.960
238.	Jabatan Fungsional Perawat Muda	9	1.385
239.	Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana	6	690
240.	Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.035
241.	Jabatan Fungsional Perawat Penyelia	8	1.260
242.	Jabatan Fungsional Perawat Pertama	8	1.310
243.	Jabatan Fungsional Perekam Medis Pelaksana	6	770
	Jabatan Fungsional Perekam Medis pelaksana Lanjutan	7	1.035

244.			
245.	Jabatan Fungsional Perkam Medis Penyelia	8	1.260
246.	Jabatan Fungsional Perkam Medis Pertama	8	1.280
247.	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda	10	1.610
248.	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama	8	1.280
249.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pertama	8	1.280
250.	Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Pertama	8	1.280
251.	Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.355
252.	Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	740
253.	Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
254.	Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.230
255.	Jabatan Fungsional Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	1.310
256.	Jabatan Fungsional Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
257.	Jabatan Fungsional Pustakawan Penyelia	8	1.230
258.	Jabatan Fungsional Pustakawan Pertama	8	1.280
259.	JABATAN FUNGSIONAL Radiografer Muda	9	1.355
260.	Jabatan Fungsional Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	1.035
261.	Jabatan Fungsional Radiografer Penyelia	8	1.260
262.	Jabatan Fungsional Radiografer Pertama	8	1.280
263.	Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7	1.035
264.	Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7	1.035
265.	Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien Penyelia	8	1.260
266.	Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana	6	755
267.	Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.020
268.	Jabatan Fungsional Sanitarian Penyelia	8	1.245
269.	Jabatan Fungsional Sanitarian Pertama	8	1.295

1	2	3	4
270.	Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Pertama	8	1.280
271.	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	8	1.325
272.	Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770
273.	Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
274.	Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Penyelia	8	1.260
275.	Jabatan Fungsional Teknisi Jalan dan Jembatan Pertama	8	1.325
276.	Jabatan Fungsional Teknisi Penyehatan Lingkungan Pertama	8	1.325
277.	Juru Pungut Retribusi	5	490
278.	Juru Sita	6	690
279.	Juru Survei Permukiman Perumahan	5	490
280.	Kustodian Barang Milik Negara	7	890
281.	Operator Alat Berat	5	490
282.	Pemandu Kerukunan Umat Beragama	5	490
283.	Pemantau Pelaksanaan Rencana Umum Energi	7	890
284.	Pemelihara Bangunan	5	490
285.	Pemelihara Jalan	5	490
286.	Pemelihara Peralatan	5	490
287.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490
288.	Pemeriksa Anggaran	7	890
289.	Pemeriksa Data Profesi Keuangan	7	890
290.	Pemeriksa Industri	7	890
291.	Pemeriksa Perempuan dan Anak	7	890
292.	Pemeriksa Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	7	890
293.	Penagih Retribusi	5	490
294.	Penata Laporan Keuangan	7	890
295.	Penata bangunan Gedung dan Permukiman	7	890
296.	Penata Kendaraan Dinas	7	890
297.	Penata Keuangan	7	890
298.	Penata Laporan Keuangan	7	890
299.	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	7	890
300.	Penelaah Andalalin	7	890
301.	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	890
302.	Penelaah Keberatan Tingkat I	7	890
303.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	890
304.	Penelaah Mutu konstruksi	7	890
305.	Penelaah Pemohon Ijin Angkutan Barang	7	890
306.	Penelaah Penerapan dan Pelayanan Teknis	7	890
307.	Penelaah Pengembangan Usaha	7	890
308.	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	5	490
309.	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	490
310.	Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi	5	490
311.	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	5	490
312.	Pengadministrasi Anggaran	5	490
313.	Pengadministrasi Bahan Pengujian Sarana	5	490
314.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	490
315.	Pengadministrasi Batas Wilayah	5	490
316.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	490
317.	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	490
318.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
319.	Pengadministrasi Kependidikan	5	490
320.	Pengadministrasi Keuangan	5	490
321.	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	490
322.	Pengadministrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	5	490
323.	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	490
324.	Pengadministrasi Otonomi Daerah	5	490
325.	Pengadministrasi Pajak	5	490
326.	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	5	490
327.	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490
328.	Pengadministrasi Penerimaan	6	690
329.	Pengadministrasi Penerimaan	5	490
330.	Pengadministrasi Pengaduan Publik	5	490
331.	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	5	490
	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	5	490

332.			
333.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490
334.	Pengadministrasi Perizinan	5	490
335.	Pengadministrasi Persuratan	5	490
336.	Pengadministrasi Pertanahan	5	490
337.	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5	490
338.	Pengadministrasi Rapat	5	490
339.	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah sosial	5	490
340.	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	490
1	2	3	4
341.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
342.	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	5	490
343.	Pengadministrasi Umum	5	490
344.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	5	490
345.	Pengatur Lalu Lintas Jalan	6	690
346.	Pengawas dan Pembina Angkutan	7	890
347.	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	890
348.	Pengawas Kelistrikan	7	890
349.	Pengawas Kepariwisata	7	890
350.	Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan	7	890
351.	Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7	890
352.	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	7	890
353.	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	890
354.	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	7	890
355.	Pengawas Perempuan dan Anak	7	890
356.	Pengawas Transportasi	7	890
357.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	690
358.	Pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi	6	690
359.	Pengelola Anggaran	6	690
360.	Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas	6	690
361.	Pengelola Bahan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6	690
362.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
363.	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	690
364.	Pengelola Data	6	690
365.	Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	6	690
366.	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	6	690
367.	Pengelola Data Keuangan Daerah	6	690
368.	Pengelola Data Pencairan Dana	6	690
369.	Pengelola Data Rekonsiliasi	6	690
370.	Pengelola Data Transaksi	6	690
371.	Pengelola Dokumentasi	6	690
372.	Pengelola Gaji	6	690
373.	Pengelola Informasi Kepariwisata	6	690
374.	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	6	690
375.	Pengelola Kebidanan	6	690
376.	Pengelola Kefarmasian	6	690
377.	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	6	690
378.	Pengelola Keperawatan	6	690
379.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690
380.	Pengelola Ketahanan Pangan	6	690
381.	Pengelola Ketransmigrasian	6	740
382.	Pengelola Keuangan	6	690
383.	Pengelola Laboratorium	6	690
384.	Pengelola Layanan Kehumasan	6	690
385.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	690
386.	Pengelola Logistik	6	690
387.	Pengelola Pajak Daerah	6	690
388.	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	6	690
389.	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	690
390.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
391.	Pengelola Pemantauan	6	690
392.	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	690
393.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	690
394.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	690
395.	Pengelola Pembinaan Pembangunan	6	690
396.	Pengelola Pemeliharaan Laboratorium	6	690
397.	Pengelola Penagihan Dan Pengawasan	6	690
398.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	690
399.	Pengelola Pendapatan	6	690
400.	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	690
401.	Pengelola Pengembangan Otonomi Daerah	6	690
402.	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	7	890
403.	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	6	690
404.	Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Daerah	6	690
405.	Pengelola Perjalanan Dinas	6	690
406.	Pengelola Perparkiran	6	690
407.	Pengelola Perpustakaan	6	690
408.	Pengelola Perumahan dan Pemukiman	6	690
409.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
410.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
411.	Pengelola Program Gizi	6	690

1	2	3	4
412.	Pengelola Program Imunisasi	6	690
413.	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	690
414.	Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata	6	690
415.	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6	690
416.	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	6	690
417.	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	690
418.	Pengelola Rumah Tangga	6	690

419.	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	6	690
420.	Pengelola Sertifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	6	690
421.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	690
422.	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	690
423.	Pengelola Tenaga Kependidikan	6	690
424.	Pengelola Terjemahan dan Kerjasama	6	690
425.	Pengelola Terminal	6	690
426.	Pengemudi	3	340
427.	Pengemudi Ambulan	4	440
428.	Pengemudi <i>Very Important Person</i>	5	490
429.	Pengevaluasi Kinerja Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	7	890
430.	Pengevaluasi Standard Pelayanan Minimum Angkutan	6	690
431.	Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja	6	740
432.	Pengolah Daftar Gaji	6	690
433.	Pengolah Data	6	690
434.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
435.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	6	690
436.	Pengolah Informasi dan Komunikasi	5	490
437.	Penilai Pelayanan Kemetrologian	7	890
438.	Penyuluh Bimbingan atau Konseling Eks Penyandang Penyakit Sosial	7	890
439.	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7	890
440.	Penyuluh Kearsipan	7	890
441.	Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja	7	890
442.	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	890
443.	Penyuluh Lingkungan Hidup	7	890
444.	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	7	890
445.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	7	890
446.	Penyuluh Perkebunan	7	890
447.	Penyuluh Tenaga Kerja	7	890
448.	Penyurvei Batas Wilayah Administrasi	7	890
449.	Penyurvei Pemaduan Moda Transportasi	7	890
450.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7	890
451.	Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi	7	890
452.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	7	890
453.	Penyusun Laporan Keuangan	7	890
454.	Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	7	890
455.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
456.	Penyusun Program Pembinaan Pranata Sosial	7	890
457.	Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat	7	890
458.	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	7	890
459.	Penyusun Rekayasa Lalu Lintas	7	890
460.	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	7	890
461.	Penyusun Rencana Kebijakan	7	890
462.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	890
463.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
464.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
465.	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	7	890
466.	Penyusun rencana Pelayanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	7	890
467.	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	890
468.	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	890
469.	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	7	890
470.	Penyusun Risalah	7	890
471.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	890
472.	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	890
473.	Perencana Lalu Lintas (<i>Traffic Planner</i>)	7	890
474.	Petugas Ukur	3	340
475.	Pramu Bakti	1	190
476.	Pranata Barang Bukti	6	690
477.	Pranata Barang dan Jasa	6	690
478.	Pranata Jamuan	5	490
479.	Pranata Kearsipan	6	690
480.	Pranata Pemadam Kebakaran	6	690
481.	Pranata Perlindungan Masyarakat	5	490
482.	Pranata Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan	6	690
1	2	3	4
483.	Pranata Taman	5	490
484.	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	490
485.	Pranata Tilang	6	690
486.	Teknisi Air	5	490
487.	Teknisi Jaringan Instalasi	5	490
488.	Teknisi Keciptakarya	5	490
489.	Teknisi Listrik dan Jaringan	5	490
490.	Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift	5	490
491.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	690
492.	Teknisi Perikanan Budidaya	5	490
493.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	490
494.	Teknisi Survei Angkutan Jalan	6	690
495.	Teknisi Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	6	690
496.	Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan	5	490
497.	Verifikator Anggaran	6	690
498.	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690
499.	Verifikator Keuangan	6	690
500.	Verifikator Medis	6	690
501.	Verifikator Pajak	6	690

WALI KOTA DUMAI,
dto
PAISAL